



IMPLEMENTASI PENGELOLAAN APBN GUNA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Retno Pratiwi Andari, Sri Yanto, Djoko Andreas N, Heru Prasetyo

Ekonomi Pertahanan, Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia

Abstrak

Disetujui DPR, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai cetak biru keuangan tahunan pemerintah Indonesia. Terhitung mulai 1 Januari hingga 31 Desember, APBN menyajikan rincian komprehensif antisipasi pendapatan dan belanja negara secara metodelis dan rinci. Untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan mencapai tujuan negara, pemerintah membuat APBN setiap tahun. Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal sebagai bagian dari strategi makro ekonomi melalui APBN, memiliki pengaruh yang signifikan dan strategis terhadap perekonomian, terutama dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Untuk pertumbuhan ekonomi yang stabil dan konsisten, inflasi harus rendah. Pada akhirnya, ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kata Kunci: APBN, Implementasi, Pertumbuhan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Setiap tahun, pemerintah membuat APBN untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan mencapai tujuan negara. Santoso (2022) menyatakan bahwa Pengelolaan APBN harus dilakukan secara efisien dan akuntabel serta sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Hal ini sejalan dengan esensi cetak biru keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam APBN

meliputi pemasukan dan pengeluaran dana negara dalam satu tahun anggaran, dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember (Kemenkeu, 2022).

Kebijakan fiskal diperlukan agar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dapat diterapkan. Ekonomi dipengaruhi secara signifikan dan strategis oleh kebijakan fiskal, yang merupakan kebijakan utama pemerintah yang diterapkan melalui APBN. Ini terutama dilakukan untuk

*Correspondence Address : Retnoandari17@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v11i11.2024. 4409-4414

© 2024UM-Tapsel Press

mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan nasional (Sazali, 2020). Pemerintah terus berfokus pada dua aspek penting pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Tahun ini, pemerintah berfokus pada aspek gilirasi. Karena tiga elemen tersebut merupakan ukuran kesejahteraan masyarakat, hal ini menjadi fokus utama pemerintah dalam pelaksanaan APBN. Data BPS 3 menunjukkan bahwa komponen tersebut terus mengalami peningkatan dan penurunan. Meskipun ada penurunan tahun ini, itu tidak terlalu besar dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam penggunaan APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, hal ini masih harus menjadi perhatian pemerintah. Tahun ini juga Pemerintah memiliki 5 aspek penting yang ingin dicapai Dengan kata lain, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat reformasi sistem perlindungan sosial untuk mengintegrasikan data yang lebih baik, pembangunan infrastruktur, revitalisasi industri dan ekonomi hijau. Penelitian ini berfokus pada implementasi pemerintah dalam APBN untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan data yang dikumpulkan dari laporan keuangan APBN terkini, badan pusat statistika (BPS), dan web pemerintahan y. Penelitian ini menggunakan model kualitatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan menggunakan metode studi literatur review dengan melakukan pengumpulan, analisis, dan sintesis penelitian yang telah ada. Tujuan utamanya adalah untuk memahami apa yang telah diketahui dari penelitian sebelumnya, menemukan kesenjangan dalam pengetahuan yang ada, dan mengidentifikasi peluang untuk penelitian lebih lanjut. Review literatur biasanya melibatkan penelitian

sekunder, yaitu penelitian yang dilakukan pada data yang telah dikumpulkan oleh peneliti lain. Penelitian ini tentang implementasi pengelolaan APBN guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif berbasis analisis induktif yang melibatkan pengumpulan, penyusunan, dan penjelasan berbagai data, dokumen, dan informasi konsisten. Dengan menggunakan model kualitatif, penelitian ini menggunakan laporan keuangan yang dikumpulkan dari jurnal dan situs web pemerintah yang relevan. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini termasuk hasil penelitian, buku, laporan, dan dokumen peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan APBN di Indonesia

APBN adalah alat untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara untuk membiayai pemerintahan dan proyek pembangunan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan stabilitas ekonomi, dan menetapkan prioritas pembangunan umum. Pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur keuangan negara dan bagaimana hal itu berdampak pada ekonomi negara, menurut Pasal 23 Ayat 1 UUD 1945. Ini merupakan dasar APBN Indonesia. Oleh karena itu, sistem anggaran dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan hati-hati dan sistematis untuk memaksimalkan fungsi APBN (Lestari et al., 2018). Alat untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara untuk membiayai operasi pemerintah, pertumbuhan, dan pembangunan ekonomi adalah APBN. Ini meningkatkan pendapatan, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan garis besar dan prioritas pembangunan (Sazali, 2020).

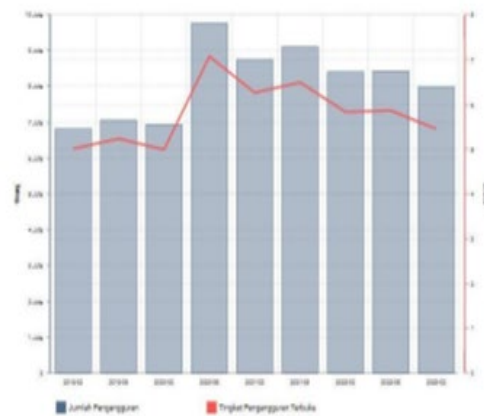
Sejak tahun 2021, pengelolaan APBN Indonesia dilakukan dengan baik, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Fokus pengimplementasian pemerintah terus mengalami penurunan, meskipun tidak signifikan. Pendapatan negara pada tahun ini mencapai Rp 2.463,0 T, naik 1,1 % dari tahun sebelumnya, dan belanja negara sebesar Rp 2.246,5 T, turun 5,2% dari tahun sebelumnya. Untuk meningkatkan produktivitas, pemerintah telah melakukan banyak hal, termasuk melanjutkan reformasi struktural yang meningkatkan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia, reformasi penganggaran yang menghasilkan belanja yang lebih efisien dan berkualitas, dan akselerasi transformasi ekonomi. Menteri keuangan RI Sri Mulyani Indrawati. Ini termasuk: (1) normalisasi aktivitas masyarakat sebagai akibat dari perbaikan pandemi; (2) peningkatan daya tarik investasi, termasuk ekonomi digital, hilirisasi manufaktur, dan ekonomi hijau; dan (3) revitalisasi sektor manufaktur sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (Segara dan Reza, 2023).

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,3% pada tahun 2023. Indikator target kesejahteraan sosial menunjukkan hasil yang inklusif dan berkelanjutan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) diharapkan berada di antara 5,3 dan 6,0 persen. Tingkat kemiskinan diharapkan turun menjadi 7,5 hingga 8,5 persen dan gini ratio diharapkan turun Indeks pembangunan manusia (IPM) berkisar antara 0,375 dan 0,378. yang diharapkan meningkat menjadi 73,31-73,49 menunjukkan upaya untuk meningkatkan indikator kesejahteraan. Pendapatan negara pada tahun ini sebesar Rp 2.463,0 T, naik 1,1 % dari tahun 2022, yang berasal dari perpajakan sebesar Rp 2.021,2 T yang

naik 5,0% dari tahun 2022, PNB Rp 441,4 T yang mengalami penurunan 13,6% dari tahun 2022, dan hibah sebesar Rp 0,4 T. Selain itu, belanja negara pada tahun ini sebesar Rp3.061,2 T turun 3,4% dari tahun 2022, dengan transfer ke daerah sebesar 814,7 T meningkat 2,0% dari tahun 2022, dan belanja negara untuk belanja pemerintah pusat sebesar 2.246,5 T turun 5,2% dari tahun 2022. Dengan demikian, defisit anggaran 598,2 T dan pembiayaan anggaran (utang) 598,2 T turun sekitar 8,2% dari tahun 2022 (Segara dan Reza, 2023).

a. Tingkat Pengangguran Nasional

Menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), secara persentase telah meningkat dan menurun setiap tahun dalam lima tahun terakhir. Perubahan ini ditunjukkan pada diagram di bawah ini, yang menunjukkan peningkatan dan penurunan tingkat pengangguran



Sumber: Badan Pusat Statistika,2023

Jumlah pengangguran bulan Februari tahun 2023 turun sebesar 5,45% dibandingkan Februari 2022, yang masih 5,86%. Data statistik juga menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia terus meningkat selama lima tahun ini, turun

sebesar 410 ribu jiwa dari 7,99 juta jiwa pada tahun 2022 (Ahdiat, 2023).

Dengan jumlah APBN yang besar setiap tahunnya di Indonesia, upaya untuk memerangi pengangguran masih kurang efektif atau belum memberikan pengaruh yang signifikan, seperti yang ditunjukkan oleh grafik data bps yang terus mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah setiap tahun melakukan perbaikan dan berfokus pada penciptaan lapangan pekerjaan untuk mengurangi tingkat pengangguran saat ini.

b. Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Tingkat kemiskinan di Indonesia sejalan dengan tingkat pengangguran. Hal ini dapat dibuktikan pada gambar dibawah ini



Sumber: Badan Pusat Statistika,2023

Tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dan kenaikan selama lima tahun terakhir 2019–2023, seperti yang ditunjukkan pada grafik di atas. Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2020 akhir-2021, ketika pandemi COVID-19 menghentikan aktivitas ekonomi. Untuk tahun ini, tingkat kemiskinan turun sebesar 0,21 persen poin dibandingkan September 2022 dan 0,18 persen poin dibandingkan Maret 2022, atau sebesar 0,46 juta orang dibandingkan September 2022 dan 0,26 juta orang dibandingkan Maret 2022. Akibatnya, jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini sebanyak 25,90 juta orang.

c. Tingkat ketimpangan (giniratio) di Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistika, 2023

Gini Rasio Kota Indonesia pada Maret 2023 adalah 0,409—naik dari 0,402 pada September 2022 dan 0,403 pada Maret 2022—dan 0,313 pada Maret 2023. Ini tidak berubah dari September 2022 dan turun dari 0,314 pada Maret 2022—dan naik 0,007 poin dari Gini Rasio September 2022 sebesar 0,381.

B.Fokus APBN

Fokus setiap tahun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat berubah, tergantung pada kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan kebutuhan masyarakat. Namun, secara umum, terdapat beberapa fokus umum dalam pembuatan APBN yang mencerminkan prioritas dan tujuan pemerintah:

1. Pertumbuhan Ekonomi: APBN sering dibuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
2. Pendidikan dan Kesehatan: APBN sering berfokus pada sektor pendidikan dan kesehatan. Ini dapat mencakup alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, beasiswa, dan insentif bagi pelaku usaha.
3. Pertahanan dan Keamanan: Sebagian besar anggaran dialokasikan oleh pemerintah untuk masalah pertahanan dan keamanan. Ini termasuk membantu operasional militer, membeli peralatan pertahanan, dan meningkatkan keamanan nasional.

4. Pengentasan Kemiskinan dan Bantuan Sosial: Program untuk mengakhiri kemiskinan dan bantuan sosial seringkali dimasukkan ke dalam APBN untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Ini dapat termasuk program bantuan tunai, bantuan pangan, dan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Pengelolaan Utang: Fokus APBN adalah pengelolaan utang. Pemerintah harus memastikan bahwa utang tidak melebihi kapasitas pembayaran dan bahwa sumber daya dialokasikan dengan bijak untuk meminimalkan risiko keuangan.

6. Pengelolaan Sumber Daya Alam: Sebagian anggaran negara dialokasikan untuk pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam. Ini dapat termasuk proyek yang berkaitan dengan eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi sumber daya alam. Untuk menangani masalah pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan (gini ratio), pemerintah menetapkan bahwa fokus APBN tahun 2023 adalah lima hal: peningkatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, revitalisasi industri, ekonomi hijau, dan peningkatan kualitas data melalui reformasi sistem perlindungan sosial yang dipercepat (OJK, 2023).

SIMPULAN

Pemerintah harus berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, khususnya menurunkan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan kemiskinan, dan menetapkan prioritas pembangunan umum melalui APBN, alat yang mengontrol pengeluaran dan pendapatan negara untuk mencapai stabilitas ekonomi dan membiayai operasi pemerintahan dan pembangunan.

Menurut data dari Badan Pusat Statistika, tingkat pengangguran tahun

2023 turun menjadi 5,45% pada Februari 2023, turun dari 5,86% pada Februari 2022. Data statistik juga menunjukkan bahwa statistik pengangguran di Indonesia terus meningkat dalam kurun waktu lima tahun ini. Pada tahun 2023, jumlah pengangguran sebesar 7,99 juta orang turun 410 ribu orang dari tahun 2022. Adanya APBN yang sangat besar di Indonesia setiap tahun menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk mengatasi pengangguran masih kurang efektif atau belum menghasilkan hasil yang signifikan. Ini menunjukkan oleh grafik data bps yang terus mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah terus memberikan perhatian yang lebih besar untuk menciptakan lapangan kerja.

Tingkat kemiskinan tahun 2023 turun sebesar 0,21% dari September 2022 menjadi 0,18% dari Maret 2022, atau sebesar 0,46% dari September 2022 dan 0,266% dari Maret 2022. Dengan demikian, ada 25,90 juta orang di Indonesia yang saat ini dianggap miskin, menurut data dari Badan Pusat Statistika. Tingkat ketimpangan (giniratio) 2023: Tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat Indonesia pada Maret 2023 adalah 0,388, meningkat 0,007 poin dari 0,381 pada September 2022 dan 0,004 poin dari 0,384 pada Maret 2022, menurut data dari Badan Pusat Statistika.

Fokus tambahan pemerintah pada APBN 2023 terdiri dari lima elemen: peningkatan kualitas sumber daya manusia, mempercepat reformasi sistem perlindungan sosial untuk data yang lebih baik secara menyeluruh, pembangunan infrastruktur, revitalisasi sektor bisnis, dan ekonomi hijau.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada para dosen pengajar serta teman-teman

seperjuangan Ekonomi Pertahanan cohort XIV Universitas Pertahanan Indonesia yang sudah membantu dalam pembuatan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ahdiat. 2023. *Awal 2023, Ada 7,9 Juta Pengangguran di Indonesia*. Diakses Pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/05/awal-2023-ada-79-juta-pengangguran-di-indonesia>

Badan Pusat Statistika. 2023. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>

Ke Kementerian Keuangan. 2022. *Mengenal, Memahami dan Menjaga APBN*. Diakses pada <https://kwbcjatim1.beacukai.go.id/eperpus/2022-apbn-week-2022-mengenal-memahami-dan-menjaga-apbn>

Lestari, I Wayan, dan Gede Putu. 2018. *Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Dalam Jurnal Manajemen Vol. 4 No: 1

Otoritas Jasa Keuangan.2023. *5 Fokus Utama APBN 2023: Pertama Bangun Kualitas SDM Unggul*. Diakses pada <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/news/read/1146/5-fokus-utama-apbn-2023-pertama-bangun-kualitas-sdm-unggul>

Sazali.,M.2020. *Implementasi Pengelolaan Keuangan Negara dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi APBN 2009-2017)*. Dalam Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol.6 No:2

Segara, Reza Ibnu. 2023. *Informasi APBN 2023 Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inkusif dan Berkelanjutan*. Diakses pada https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/6439fa59-b28e-412d-adf5_e02fdd9e7f68/Informasi-APBN-TA-2023.pdf?ext=.pdf